

---

## ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (*ISPO*) DALAM USAHA KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Kebun Baru PTPN I dan Kebun Rambutan PTPN III)

Azhari Rizal<sup>1</sup>, Siti Hamidah<sup>2</sup>, Sri Wuryani<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
<sup>1</sup>azharirizal05@gmail.com

### ABSTRAK

*Indonesian Sustainable Palm Oil* merupakan sistem Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang merupakan suatu produk peraturan perundangan yang digunakan untuk memastikan diterapkannya proses budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan dan mendukung komitmen Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis penerapan sertifikasi *ISPO* di kebun baru PT Perkebunan Nusantara I dilihat dari prinsip dan kriteria *ISPO* di kebun baru PT Perkebunan Nusantara I. 2) Menganalisis produktivitas tandan buah segar di kebun baru PT Perkebunan Nusantara I dan PT Perkebunan Nusantara III. Metode pelaksanaan pada penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan studi kasus dan uji beda *t-test*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan menggunakan kuesioner dengan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tingkat penerapan sertifikasi *ISPO* di kebun baru berada dalam kategori baik dengan nilai 92,79%, 2) tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil analisis produktivitas tandan buah segar di kebun rambutan PT Perkebunan Nusantara III dan kebun baru PT Perkebunan Nusantara I.

**Kata Kunci :** Sertifikasi, *ISPO*, Keberlanjutan, Sawit, Produktivitas,

### PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, terjadi pergeseran pasar minyak nabati dunia, dari sebelumnya di dominasi konsumsi minyak kedelai yang diproduksi negara maju menjadi minyak sawit yang diproduksi di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, dan negara penghasil minyak sawit lainnya (Apriyanto, 2013). Kemampuan minyak sawit menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas minyak per hektar tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya telah menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat populer dan paling banyak dikonsumsi saat ini dan dapat diproduksi sepanjang tahun. Bagi Indonesia, perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis mulai dari hulu hingga ke hilir. Selain itu juga menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani, serta menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan besar dalam menghasilkan devisa negara. Tak ayal jika ditinjau dari luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 20 tahun terakhir meningkat pesat sejak tahun 1996, dari 2,25 juta hektar meningkat hingga 4 kali lipatnya menjadi 11,30 juta hektar pada tahun 2015. Sejalan dengan peningkatan luasan perkebunan kelapa sawit, produksi kelapa sawit Indonesia tahun 2000 sebanyak 7,0 juta ton meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2016 menjadi 32.22 juta ton (Ditjenbun, 2015)

Peningkatan produksi minyak sawit yang sangat cepat dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang kemudian berpotensi menyumbang kontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Menanggapi berbagai isu dan permasalahan perkebunan kelapa sawit maka pemerintah Indonesia memandang perlu disusunnya sebuah pedoman *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* guna menjawab tuntutan untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan yang datang dari konsumen, industri, pembeli dan stakeholder perkelapasawitan lainnya. Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan pembangunan lintas sektor, sehingga harus tunduk dan patuh pada seluruh ketentuan/perundangan seluruh instansi terkait yang berlaku, tidak hanya dibidang pertanian/perkebunan saja. Secara garis besar, pedoman *ISPO* didasarkan pada 4 hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang dirumuskan

dalam 7 prinsip diantaranya legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dari 7 prinsip tersebut kemudian dirinci ke dalam 45 kriteria dan 141 indikator sesuai dengan Permentan Republik Indonesia No. 11/2015

PT Perkebunan Nusantara III dan PT Perkebunan Nusantara I merupakan salah satu *subsidiary holding* BUMN Perkebunan yang mayoritas mengelola komoditas kelapa sawit. Salah satu kebun yang diusahakan di PT Perkebunan Nusantara I adalah unit Kebun Baru, unit kebun ini belum tersertifikasi *ISPO* namun telah menjalani penilaian stage satu pada desember 2015 lalu dari dua stage yang harus dijalankan guna mendapatkan sertifikasi *ISPO*. Pada penilaian stage satu tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa temuan yang harus ditindak lanjuti oleh Kebun Baru agar dapat melanjutkan ke penilaian stage kedua, namun kendala ini belum juga teratasi sampai dengan sekarang. Sedangkan unit Kebun Rambutan PT Perkebunan Nusantara III telah tersertifikasi *ISPO* sejak juni 2015, pada prosesnya penilaian stage satu di Kebun Rambutan dilakukan pada bulan juli 2013, dilanjutkan dengan tahap penilaian stage dua pada september 2013. Butuh waktu sekitar 2 tahun sejak penilaian stage dua untuk Kebun Rambutan dinyatakan *certified* oleh komisi *ISPO*. Hal ini dikarenakan pihak auditor terus berkomunikasi dengan Kebun Rambutan PT Perkebunan Nusantara III guna melengkapi syarat prinsip dan kriteria yang belum terpenuhi pada audit stage II hingga akhirnya semua persyaratan itu terpenuhi. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dilihat dari prinsip dan kriteria *ISPO* di kebun baru PT. Perkebunan Nusantara I serta menganalisis produktivitas kebun rambutan PT Perkebunan Nusantara III dan kebun baru PT Perkebunan Nusantara I

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan menggunakan kuesioner serta hasil observasi lapangan, dengan jenis data primer dan sekunder. Untuk menganalisis prinsip dan kriteria *ISPO* yang berjumlah 7 prinsip, 45 kriteria dan 141 indikator dilakukan dengan wawancara terarah (*guided interview*) menggunakan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan. Responden dapat menjawab “ya” apabila indikator telah terpenuhi dan “tidak” apabila indikator belum terpenuhi. Responden dalam penelitian berjumlah 11 yang kesemuanya karyawan pimpinan kebun seperti staf perusahaan, manager kebun, asisten kepala dan asisten kebun. Metode analisis data yang dipergunakan yaitu analisis deskriptif, analisis uji beda *t-test*. Menurut (Arikunto, 2013) jika pilihan jawaban di kuesioner berbentuk “ya” dan “tidak”, peneliti tinggal menjumlahkan saja berapa banyak jawaban “ya” dan “tidak”. Dari jawaban kemudian diubah menjadi persentase ketercapaian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis tingkat penerapan sertifikasi *ISPO* di kebun baru PTPN I

Untuk menganalisis tingkat penerapan sertifikasi *ISPO* di kebun baru PT. Perkebunan Nusantara I dilakukan dengan analisis deskripsi. Analisis ini dilakukan terhadap prinsip dan kriteria *ISPO* terhadap keadaan kebun baru PT Perkebunan Nusantara I.

#### 1. Prinsip Legalitas Usaha

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteria legalitas usaha perkebunan yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 1 berikut.

Dilihat dari tabel 1, prinsip legalitas usaha perkebunan di Kebun Baru PT. Perkebunan Nusantara I memiliki rata-rata persentase 59,1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala di bidang legalitas usaha perkebunan di Kebun baru PT. Perkebunan Nusantara I. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya beberapa kriteria dari prinsip legalitas usaha perkebunan ini. Diantaranya belum memiliki izin usaha perkebunan yang merupakan proses pemenuhan terhadap persyaratan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 pada pasal 57 ayat 1 yang mana disebutkan “Perusahaan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki izin tetap usaha budidaya perkebunan (ITUBP), izin tetap usaha industri perkebunan, Surat pendaftaran

usaha perkebunan, atau izin usaha perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan wajib memiliki IUP-B, IUP-P Atau IUP paling lambat 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan".

Selain belum memiliki izin usaha perkebunan Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I juga terkendala pada kriteria fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perusahaan sebesar 20% dari total areal yang diusahakan, untuk hal ini pada saat penilaian sertifikasi ISPO stage satu perusahaan telah mengkonsultasikan kepada auditor PT mutuagung Lestari perihal posisi perusahaan yang telah dikelola sebelum ketentuan Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 Tahun 2007 juncto peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 diberlakukan

**Tabel 1.** Prinsip legalitas usaha di Kebun Baru PT. Perkebunan Nusantara I

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Izin lokasi	44	44	100%
2	Izin usaha perkebunan	66	7	10,6%
3	Perolehan lahan usaha perkebunan	44	22	50%
4	Hak atas tanah	11	11	100%
5	Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat	33	0	0%
6	Lokasi perkebunan	33	33	100%
7	Tanah terlantar	11	8	72,7%
8	Sengketa lahan	33	33	100%
9	Bentuk badan hukum	11	11	100%
<b>Rata-Rata</b>		<b>286</b>	<b>169</b>	<b>59,1%</b>

Sumber : Data primer diolah, 2018

## 2. Prinsip manajemen perkebunan

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteria manajemen perkebunan yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 2 berikut

**Tabel 2.** Prinsip manajemen perkebunan di kebun baru PTPN I

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Perencanaan perkebunan	55	51	92,7%
2	Pembukaan lahan	33	33	100%
3	Pembenihan	44	44	100%
4	Penanaman pada lahan mineral	22	22	100%
5	Penanaman pada lahan gambut	44	44	100%
6	Pemeliharaan tanaman	22	22	100%
7	Pengendalian OPT	33	33	100%
8	Pemanenan	33	33	100%
9	Pengangkutan tandan buah segar	22	22	100%
10	Penerimaan TBS di unit pengolahan	33	33	100%
11	Pengolahan TBS	44	44	100%
12	Pengelolaan limbah	55	55	100%
13	Pemanfaatan limbah	33	33	100%
14	Tumpang tindih usaha pertambangan	22	22	100%
15	Rencana dan realisasi	22	22	100%
16	Penyediaan data dan Informasi	33	33	100%
<b>Rata-Rata</b>		<b>550</b>	<b>546</b>	<b>99,3%</b>

Sumber : Data primer diolah, 2018

Pada prinsip manajemen perkebunan secara keseluruhan kesesuaian penerapan sertifikasi ISPO di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I berjalan baik dengan nilai persentase 99,3%. Adapun ketidaksesuaian yang terdapat pada prinsip manajemen perkebunan ini ada pada indikator

sistem manajemen sumber daya manusia pada kriteria perencanaan perkebunan yang mana masih terdapat pekerja yang bekerja selama 21 hari per bulan untuk tiga bulan berturut-turut belum dipertimbangkan untuk diangkat menjadi karyawan tetap (karyawan pelaksana), hal ini bertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 100 tahun 2004 pasal 10.

### 3. Prinsip perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteria perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Prinsip perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut di kebun baru PT. Perkebunan Nusantara I

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut	22	22	100%
<b>Rata-Rata</b>		22	22	100%

Sumber : Data primer diolah, 2018

Dilihat dari tabel 3, diketahui bahwa keseluruhan kriteria dan indikator terpenuhi (100%), dari hasil observasi diketahui pula areal yang diusahakan di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I tidak terdapat lahan gambut ataupun areal yang didapat dari hutan alam primer. Berdasarkan keterangan staf perusahaan dan kebun, areal yang diusahakan di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I berasal dari areal penggunaan lain (APL) dan hutan produksi yang memang dapat dikonversi (HPK), hal ini sesuai dengan kriteria perolehan lahan usaha perkebunan yang terdapat pada prinsip legalitas usaha perkebunan.

### 4. Prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteriapengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4.** Prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan di kebun baru PT Perkebunan Nusantara I

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Kewajiban perusahaan perkebun terintegrasi dengan unit pengolahan	33	33	100%
2	Kewajiban terkait izin lingkungan	22	22	100%
3	Pengelolaan B3 dan limbah B3	55	55	100%
4	Gangguan dari sumber tidak bergerak	33	33	100%
5	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	55	44	80%
6	Pelestarian keanekaragaman hayati	44	44	100%
7	Konservasi terhadap sumber dan kualitas air	33	33	100%
8	Kawasan lindung	33	33	100%
9	Konservasi kawasan dengan potensi erosi	33	33	100%
10	Mitigasi emisi gas rumah kaca perusahaan	44	34	77,7%
<b>Rata-Rata</b>		385	364	94,5%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Pada prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan diketahui bahwasanya Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I telah mengikuti ketentuan dari prinsip dan kriteria ini dengan nilai persentase ketercapaian 94,5%. Masih terdapat beberapa hal yang dianggap kurang sesuai dengan penerapan *ISPO* diantaranya belum tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen dari pelaksanaan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran seperti yang terdapat pada kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran areal kebun. Dalam hal mitigasi emisi gas rumah kaca yang terdapat pada kriteria 4.10 juga belum sepenuhnya dijalankan, seperti belum tersedianya dokumen tahapan alih fungsi lahan pada awal pembangunan kebun (2 tahun sebelumnya) dan belum tersedianya rekaman pelaksanaan mitigasi gas rumah kaca yang terdokumentasi.

### 5. Prinsip tanggung jawab terhadap pekerja

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteria tanggung jawab terhadap pekerja yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 5 berikut.

**Tabel 5.** Prinsip tanggung jawab terhadap pekerja di kebun baru PT Perkebunan Nusantara I

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Keselamatan dan kesehatan kerja	33	27	81,8%
2	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja	55	55	100%
3	Penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja	55	55	100%
4	Fasilitasi pembentukan serikat pekerja	33	33	100%
5	Perusahaan perkebunan mendorong fasilitasi pembentukan koperasi karyawan	33	33	100%
<b>Rata-Rata</b>		209	203	97,1%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Pada prinsip tanggung jawab terhadap pekerja yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I diketahui bahwasanya tingkat ketercapaiannya 97,1%. Adapun kriteria yang belum sesuai dengan prinsip *ISPO* ini adalah pembentukan organisasi kesehatan dan keselamatan kerja yang didukung dengan sarana dan prasarana, pada dasarnya organisasi kesehatan dan keselamatan kerja di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I telah dibentuk dan beroperasi hanya saja sarana dan prasarana pendukungnya belum terpenuhi seperti alat pelindung diri (helm, sarung tangan, sepatu) dan sara pendukung lainnya.

### 6. Prinsip tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteria tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6.** Prinsip tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kebun baru PT Perkebunan Nusantara I

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Tanggung jawab social dan lingkungan kemasyarakatan	44	44	100%
2	Pemberdayaan masyarakat adat/asli	33	33	100%
3	Pengembangan usaha local	11	11	100%
<b>Rata-Rata</b>		88	88	100%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel 6 diketahui bahwasanya penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I telah sesuai sepenuhnya dengan prinsip yang ditentukan oleh *ISPO*

### 7. Prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan

Untuk melihat keseluruhan prinsip dan kriteria peningkatan usaha secara berkelanjutan yang terdapat di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I dijabarkan pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7.** Prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan

No	Kriteria	Skor Maksimal	Skor Dicapai	%
1	Peningkatan usaha secara berkelanjutan	11	11	100%
<b>Rata-Rata</b>		11	11	100%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Pada prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I telah sesuai sepenuhnya dengan prinsip yang ditentukan oleh ISPO.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi masing masing prinsip *ISPO*, maka untuk melihat analisa secara keseluruhan agar dapat diketahui tingkat penerapan sertifikasi *ISPO* di Kebun baru PT. Perkebunan Nusantara I akan disimpulkan dalam tabel 8

**Tabel 8.** Analisis tingkat penerapan sertifikasi *ISPO* di KBR PTPN I

No	Prinsip	Persentase
1	Legalitas usaha perkebunan	59,1 %
2	Manajemen Perkebunan	99,3 %
3	Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut	100 %
4	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan	94,5 %
5	Tanggung jawab terhadap pekerja	97,1 %
6	Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	100 %
7	Peningkatan usaha secara berkelanjutan	100 %
<b>RATA-RATA KESELURUHAN</b>		<b>92,79 %</b>

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa enam prinsip *ISPO* telah dijalankan dengan baik di Kebun Baru PT. Perkebunan Nusantara I, diantaranya manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sementara pada prinsip legalitas usaha perkebunan nilai persentasenya hanya 59,1%. Secara persentase keseluruhan penerapan sertifikasi *ISPO* di Kebun Baru sebesar 92,79%. Artinya penerapan sertifikasi *ISPO* di kebun baru belum terpenuhi seluruhnya, dikarenakan masih terdapat beberapa kriteria dan indikator yang belum terpenuhi. Mengingat persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi *ISPO* perusahaan/kebun harus memenuhi keseluruhan 141 indikator yang terdapat dalam Permentan No. 11 Tahun 2015

#### b. Analisis produktivitas kebun

Untuk menganalisis produktivitas Kebun Baru PT. Perkebunan Nusantara I yang belum tersertifikasi *ISPO* dan produktivitas Kebun Rambutan PT. Perkebunan Nusantara III yang telah tersertifikasi *ISPO* dilakukan dengan menggunakan uji beda t-test. Hasil dari uji beda t-test dapat dilihat pada tabel 9

**Tabel 9.** Hasil uji beda produktivitas kebun

Kebun	Rata-rata (ton/ha/bulan)	Std. Deviasi	Sig
Baru (PTPNN I)	1,1910	0,43450	0,285
Rambutan (PTPN III)	1,2960	0,30850	

Sumber: Bagian tanaman PTPN I dan PTPN III, diolah 2018

Berdasarkan analisis data terhadap produktivitas Kebun Rambutan PTP Nusantara III dan Kebun Baru PTP Nusantara I diketahui bahwa taraf signifikasinya sebesar  $0,285 > 0,05$  artinya tidak terdapat perbedaan nyata antara produktivitas Kebun Rambutan PT Perkebunan Nusantara III yang telah sertifikasi ISPO dengan Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I yang belum tersertifikasi ISPO, meskipun jika dilihat dari nilai rata-rata produktivitas hasil tandan buah segar Kebun Rambutan lebih besar dibandingkan dengan produktivitas Kebun Baru. Meskipun belum tersertifikasi ISPO Kebun Baru PTP Nusantara I telah menjalankan segala proses pembudidayaan tanaman kelapa sawit dengan sangat baik, indikasinya adalah telah terpenuhinya prinsip manajemen perkebunan di Kebun Baru PTP Nusantara I dengan baik, prinsip manajemen perkebunan ini mencakup perencanaan perkebunan, penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil yang mana di dalamnya telah diatur prosesnya mulai dari pembukaan lahan, pembenihan, penanaman pada lahan mineral ataupun gambut, pemeliharaan tanaman yang sesuai dengan *Good Agriculture Practices* (GAP), pengendalian organisme pengganggu tanaman dan hama terpadu, proses pemanenan bahkan sampai pada proses pengolahan hasil perkebunan. Semua kegiatan tersebut telah ada panduan dalam bentuk SOP ataupun instruksi kerja yang telah dijalankan perusahaan jauh sebelum Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2015 ini di undangkan. Maka oleh sebab itu meskipun belum tersertifikasi ISPO Kebun Baru PTP Nusantara I telah menjalankan prinsip manajemen perkebunannya dengan sangat baik sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan produktivitas kebun. Selain itu menurut (Risza, 2010) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yakni lingkungan, faktor bahan tanam dan faktor tindakan kultur teknis. Ketiga factor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting, karena tanaman kelapa sawit tidak akan tumbuh dan menghasilkan dengan baik apabila tidak ditanam diatas lahan yang sesuai peruntukannya, faktor ini dideskripsikan dengan kesesuaian lahan. Selain itu faktor bahan tanam juga penting karena budidaya kelapa sawit merupakan bisnis tahunan yang berumur  $\pm 25$  tahun, sehingga apabila kualitas bahan tanam yang digunakan kurang baik akan menimbulkan resiko besar akan kerugian. Faktor tindakan kultur teknis paling banyak mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas karena mencakup dari keseluruhan proses budidaya, mulai dari proses buka lahan sampai dengan panen dan potong buah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat penerapan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* di Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I telah 92,79 % tercapai dari 141 keseluruhan indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015
2. Produktivitas tandan buah segar Kebun Rambutan PT Perkebunan Nusantara III tidak berbeda secara signifikan dibandingkan produktivitas tandan buah segar Kebun Baru PT Perkebunan Nusantara I.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, Oni. 2013. *Indonesian Sustainable Palm Oil*. Vol 15 – No 1 Februari 2013 Hal 33 – 35. ISSN 1411 – 7584. LPPcom. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ditjenbun, 2015. *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014-2016*. Direktorat Jendral Perkebunan. Jakarta
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015. Tentang *Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)*.
- Risza, Suyatno. 2010. *Masa Depan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.